

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas suatu bangsa. Hal tersebut dapat kita lihat jika suatu bangsa tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas maka, bangsa tersebut juga tidak akan berkualitas, sebaliknya jika suatu bangsa memiliki sumber daya manusia yang berkualitas maka, bangsa tersebut juga akan berkualitas.

Seperti halnya kualitas sumber daya manusia Indonesia saat ini masih dirasa kurang berkualitas, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa secara kolektif kualitas manusia Indonesia tertinggal ketimbang negara-negara lain yang dulu di bawah Indonesia. Sementara karakter bangsa Indonesia tidak berubah dari zaman penjajah hingga kini, yaitu malas dan suka foya-foya. Berdasarkan Laporan Pembangunan Manusia yang dikeluarkan oleh PBB pada 2004 lalu, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia sebesar 0,682 atau menempati urutan 111 dari 177 negara yang diukur.¹

Untuk itu guna mewujudkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

¹ Pusat Penelitian Industri dan Perkotaan dalam situs internet

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."²

Maka pemerintah Indonesia menyelenggarakan pembangunan nasional secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah dan berkesinambungan. Adapun tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional tersebut dibutuhkan antara lain tersedianya sumber daya manusia yang tangguh, mandiri serta berkualitas. Tingkat pendidikan, pendapatan serta kesehatan penduduk Indonesia memang belum memuaskan. Menyadari bahwa tercapainya tujuan pembangunan nasional merupakan kehendak dari seluruh rakyat Indonesia dan dalam rangka menghadapi makin ketatnya persaingan bebas pada era globalisasi, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan.

Dalam hal ini peranan keberhasilan pembangunan kesehatan sangat menentukan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia karena, seperti dalam pepatah "*men`s sana in corpore sano*" yang berarti bahwa dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Begitu juga dengan sumber daya manusia, penduduk yang sehat bukan saja akan menunjang keberhasilan pendidikan, tetapi juga dapat mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan penduduk, sehingga kualitas

² Pembukaan UUD 1945 Alenia 4

sumber daya manusia Indonesia sedikit demi sedikit akan semakin terangkat. Untuk mempercepat keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut diperlukan kebijakan pembangunan kesehatan yang lebih dinamis dan proaktif dengan melibatkan semua sektor terkait, pemerintah, swasta dan masyarakat. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kinerja sektor kesehatan semata, melainkan sangat dipengaruhi oleh interaksi yang dinamis dari berbagai sektor. Upaya untuk menjadikan pembangunan nasional berwawasan kesehatan sebagai salah satu misi serta strategi yang baru harus dapat dijadikan komitmen semua pihak, disamping menggeser paradigma pembangunan kesehatan yang lama menjadi Paradigma Sehat.

Untuk menunjang keberhasilan program pendidikan, mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan penduduk serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia maka, pada tahun 1999 pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan sebuah visi yang disebut dengan visi "Indonesia Sehat 2010" melalui prasasti yang ditandatangani oleh Presiden Habibie. Penyusunan rencana pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 ini adalah manifestasi konkrit dari kehendak untuk melaksanakan pembangunan nasional berwawasan kesehatan dan paradigma sehat tersebut.

Untuk mewujudkan visi Indonesia sehat 2010 sebagai upaya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, maka desentralisasi di bidang kesehatan sangat diperlukan guna menunjang program pemerintah tersebut. Beberapa peraturan perundang-undangan bidang kesehatan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang merupakan

inti dari kebijakan desentralisasi, telah dipersiapkan misalnya, keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 574/menkes/SK/IV/2000 tentang kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia sehat 2010.

Dalam lampiran keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 ditetapkan visi dan misi serta strategi baru pembangunan kesehatan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Guna mempertegas rumusan visi Indonesia Sehat 2010 tersebut telah ditetapkan indikator-indikatornya secara lebih rinci seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2003 yang nantinya dijadikan sebagai pedoman untuk mewujudkan visi Indonesia Sehat 2010.

Namun demikian, perlu disadari bahwa dalam kerangka desentralisasi di bidang kesehatan, pencapaian visi Indonesia Sehat 2010 sangat ditentukan oleh pencapaian provinsi Sehat, Kabupaten/Kota Sehat, dan bahkan juga barangkali Kecamatan Sehat. Oleh karena itu peran pemerintah kabupaten Sleman terutama Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dalam kerangka pemerintahan daerah sangat menentukan keberhasilan dan kesuksesan dari visi "Indonesia Sehat 2010" tersebut dengan memperhatikan indikator-indikator visi Indonesia sehat 2010 pada keputusan menteri Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2003 sebagai bahan kerangka acuan dalam mewujudkan visi Indonesia sehat 2010.

Dipilihnya judul Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Dalam Mewujudkan Indonesia Sehat 2010 oleh penulis dengan alasan adalah, kabupaten sleman terutama dinas kesehatan kabupaten Sleman telah banyak menerima

penghargaan di bidang kesehatan, beberapa puskesmas di daerah kabupaten Sleman telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2001 tentang standar internasional organisasi bidang pelayanan kesehatan. Adapun puskesmas yang telah mendapatkan sertifikat tersebut antara lain adalah puskesmas Depok I, Puskesmas Mlati II, Puskesmas Minggir, dan puskesmas Ngemplak I dan satu dinas kesehatan sedang dalam proses menerapkan pelayanan dengan persyaratan ISO 9001:2001.

Adapun alasan dipilihnya kabupaten Sleman oleh penulis sebagai obyek penelitian adalah kabupaten Sleman adalah salah satu daerah yang telah berhasil menerapkan otonomi daerah dengan sistem desentralisasi, kabupaten Sleman telah banyak menerima berbagai penghargaan di berbagai bidang, dan lokasi yang dekat sehingga memudahkan peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data.

Dalam peranannya mewujudkan visi Indonesia sehat 2010 dinas kesehatan Kabupaten Sleman tidak jarang menghadapi beberapa masalah antara lain belum optimalnya pemberdayaan tenaga yang ada sesuai dengan tupoksinya, hal ini merupakan salah satu masalah, karena akan berakibat adanya kecemburuan sosial dikalangan personil, anggaran kesehatan baik yang berasal dari pemerintah pusat, daerah maupun hasil usaha dirasa masih sangat mepet dan belum mencukupi sehingga dengan minimnya dana anggaran tersebut maka berakibat pada kurangnya fasilitas dan alat medis. keberadaan tenaga medis di Kabupaten Sleman saat ini masih sangat minim, serta kurangnya kesadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dilakalangan masyarakat juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dalam mewujudkan Indonesia sehat 2010

B. PERUMUSAN MASALAH

Setelah melihat dari latar belakang masalah diatas maka dapat diambil pertanyaan sebagai perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Dalam Mewujudkan visi Indonesia Sehat 2010?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Dalam Mewujudkan Indonesia Sehat 2010?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Sebelum penulis mengemukakan tujuan dari penelitian maka, penulis akan mengemukakan pengertian penelitian dari beberapa pendapat diantaranya:

Sutrisno Hadi berpendapat bahwa:

*"Sesuai dengan tujuannya, riset dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mengembangkan dan menguji kebenaran dari suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah."*³

Menurut J Suprpto:

*"Penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan dengan sabar, hati-hati serta sistematis."*⁴

Berdasarkan kedua pendapat tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan untuk:

- menentukan dan menguji kebenaran dari suatu pengetahuan dengan metode-metode ilmiah

³ Sutrisno Hadi, MA, *Metode Research I*, Andi Offset, Yogyakarta, 1993. hal 60

⁴ Ibid Hal 24

- untuk mendapatkan fakta-fakta dan bagaimana memecahkan masalah serta pengembangannya.
- Penelitian dilakukan secara sistematis (melalui tahap-tahap tertentu)

1. Tujuan dari Penelitian yang penulis susun ini adalah:

- Untuk mengetahui peranan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Dalam Upaya Mewujudkan visi Indonesia Sehat 2010.
- Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat peran Dinas tersebut.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan sebagai bekal agar kelak dapat menerapkan kombinasi yang tepat antara teori dan praktek dalam lapangan kerja yang nyata dan sesuai.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan peranannya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mewujudkan visi Indonesia Sehat 2010.

D. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori merupakan teori-teori yang digunakan dalam melakukan penelitian sehingga kegiatan menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah, dengan teori ini penulis mencoba mengemukakan teori terlebih dahulu.

Menurut Masri Singarimbun:

“Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.”⁵

Menurut definisi teori ini mengandung tiga hal yaitu, pertama teori adalah serangkaian proposisi antar konsep yang saling berhubungan, kedua teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep, ketiga teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan hubungan antar konsep yang mana berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.

Definisi tentang teori lain menurut koentjoroningrat adalah:

“Teori merupakan pernyataan mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dalam suatu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.”⁶

Dengan demikian teori pada dasarnya merupakan sarana pokok yang menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti. Berdasarkan konsep tersebut dapat diuraikan landasan teori yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

⁵ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi; Metode Penelitian Survey, LP3, Jakarta, 1989, Hal.37.

⁶ Koentjoroningrat, Metode Penelitian Masyarakat, PT Gramedia, Jakarta, 1991, Hal.11.

1. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman

a. Peran

Menurut koentjoroningrat yang dimaksud peranan adalah:

*“peranan adalah tingkah laku individu yang mementaskan kedudukan tertentu.”*⁷

sedangkan menurut soekanto, pengertian peranan adalah:

*“peranan (role) adalah merupakan aspek dinamika dari status (kedudukan), apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia atau mereka atau organisasi tersebut telah melaksanakan suatu peranan.”*⁸

Beliau juga mengutip pendapat levinson bahwa peranan mencakup paling sedikit tiga (3) hal, yaitu:

- Peranan adalah meliputi sarana yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam arti ini menempatkan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang akan dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam suatu struktur sosial.⁹

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer pengertian mengenai peran dijelaskan sebagai berikut:

*“Peran adalah suatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.”*¹⁰

⁷ Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, LP3ES, Jakarta, 1993. Hal 4

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1998. hal 220

⁹ *ibid*, hal 221

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa:

“Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.”¹¹

Peran dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku atau kelakuan yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu kedudukan. Suatu peran atau peranan baru ada jika ada kedudukan. Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan (status). Jika seseorang melaksanakan hak dan kuajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut menjalankan peranannya. Dengan kata lain, peran seseorang tergantung dari kedudukannya.

Peran atau peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mampu mengatur perilaku seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan dapat menyelesaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.¹²

Peran atau peranan merupakan pola perilaku yang dikaitkan dengan status atau kedudukan. Sebagai pola perikelakuan, peranan mempunyai beberapa unsur, antara lain:¹³

¹⁰ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991, hal 1132

¹¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 667

¹² *ibid*, Hal 269

¹³ Soejono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal 35-36

- peranan ideal, sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu, peranan ideal tersebut dirumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait pada status-status tertentu.
- Peranan yang dianggap oleh diri sendiri, peranan ini merupakan hal yang oleh individu dilakukan pada situasi-situasi tertentu. Artinya, seorang individu menganggap bahwa dalam situasi-situasi tertentu (yang dirumuskan sendiri) dia harus melaksanakan peranan tertentu. Mungkin saja peranan yang dianggap oleh diri sendiri tersebut berbeda-beda dengan peranan ideal yang diharapkan oleh masyarakat.
- Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh individu di dalam kenyataannya, yang terwujud dalam perilaku yang nyata. Peranan yang dilaksanakan dalam kenyataan, mungkin saja berbeda dengan peranan ideal maupun peranan yang dianggap oleh diri sendiri. Peranan yang dilakukan secara aktual senantiasa dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, harapan-harapan, persepsi dan juga oleh kepribadian individu yang bersangkutan.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan adalah interaksi sosial dimana seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan untuk menjalankan aktivitas atau usaha-usaha sesuai dengan kedudukannya. Peran juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan serta direalisasikan dari kedudukan posisi atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dalam hubungan dengan kelompok atau kelompok yang lebih besar dalam suatu kegiatan. Peran adalah keikutsertaan

seseorang atau kelompok orang dalam mengambil bagian di bidang pekerjaan tertentu, yaitu menjalankan aktivitas perilaku atau melaksanakan usaha-usaha sesuai dengan kedudukannya.

b. Pemerintahan Daerah

a) Pengertian

Menurut Mariun, pemerintah dapat didefinisikan menjadi dua pengertian yakni:¹⁴

- 1) Pemerintah dalam arti luas adalah segala tugas/wewenang kekuasaan Negara, apabila kita menggunakan atau mengikuti perbidangan Montesquieu pemerintah dalam arti luas adalah bidang-bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- 2) Pemerintah dalam arti sempit diartikan sebagai tugas/kewenangan kekuasaan khusus dalam bidang eksekutif saja.

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁵.

Sesuai dengan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dalam daerah Propinsi, daerah Kabupaten dan daerah Kota yang bersifat otonom, maka mempunyai

¹⁴ Mariun, "Azas-azas ilmu pemerintahan." seksi Penerbit UGM, tahun 1979 hal. 5

¹⁵ Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004

kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

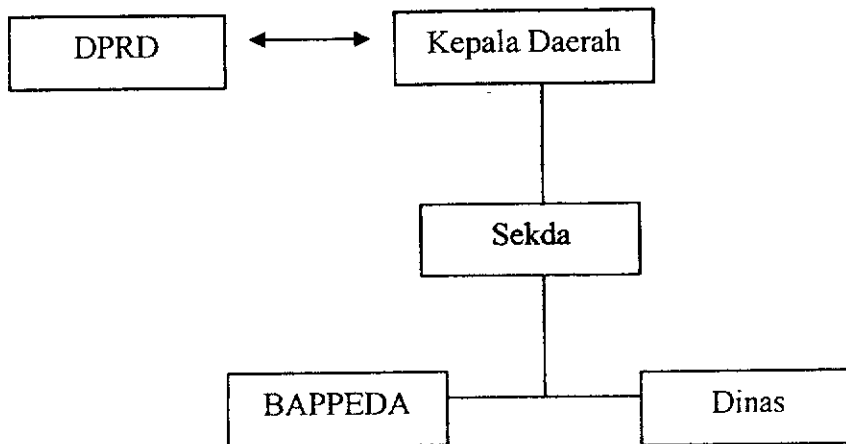
b) Pemerintah Daerah

Dalam operasional pemerintah, pemerintah daerah berfungsi untuk menjalankan semua karyawan pemerintah, kecuali wewenang bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, pengadilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan yang menyangkut kebijakan pemerintahan nasional. Dalam bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

c) Tugas Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah terdiri dari badan eksekutif yang meliputi Bupati dan dibantu Wakil Bupati serta badan eksekutif yang diisi oleh DPRD, adapun struktur pemerintahan daerah adalah sebagai berikut.

Bagan Struktur Pemerintah Daerah



Dari bagan diatas, struktur pemerintahan daerah dapat dilihat bahwa pemerintahan tertinggi dipegang oleh DPRD dan kepala daerah yang bersama-sama memimpin daerahnya, kemudian dibantu oleh sekda yang membantu tugas kepala daerah kemudian sekda untuk menjalankan tugasnya dibantu oleh BAPPEDA dan dinas-dinas pemerintah.

Dinas daerah adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah maka dilaksanakan pembentukan unsur-unsur yang oleh pemerintah pusat telah diserahkan kepada pemerintah daerah untuk menjadi urusan rumahtangganya sehingga dengan demikian pembentukan dinas daerah untuk melaksanakan unsur-unsur yang telah menjadi wewenang pemerintah pusat. Adapun dinas yang ada didaerah tersebut meliputi dinas pariwisata, dinas perindustrian, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas kehutanan, dan lain-lain.

c. Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan merupakan suatu unsur pelaksanaan dari pemerintah daerah yang mempunyai wewenang mengurus tentang bidang kesehatan dalam asas desentralisasi. Dinas ini dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Bupati selaku kepala daerah melalui sekretaris daerah.

2. Kesehatan

Kesehatan merupakan suatu karunia yang diberikan Tuhan kepada kita umat manusia yang tak ternilai harganya. Kesehatan menurut Undang-Undang RI No.23 Th. 1992 Tentang Kesehatan pasal 1 adalah:

*"Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis."*¹⁶

Dari definisi diatas, memberikan arti yang luas pada kata kesehatan. Berdasarkan definisi tersebut, seseorang belum dapat dikatakan sehat sekalipun ia tidak berpenyakit jiwa dan atau raga. Orang tersebut masih harus dinyatakan sehat secara sosial. Hal ini dianggap perlu karena, penyakit yang diderita seseorang/sekelompok masyarakat umumnya sangat ditentukan oleh perilaku/keadaan sosial budayanya yang tidak sehat.

¹⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 1992

3. Desentralisasi

Secara etimologis berasal dari kata latin "De" yang berarti lepas dan "sentris" yang berarti pusat, dengan demikian konsep desentralisasi dapat dikonotasikan adanya pelepasan wewenang dari pemerintah pusat menjadi wewenang pemerintah daerah atau lokal. Dari sudut pandang ketatanegaraan dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Ir. Sujamto mendefinisikan desentralisasi sebagai berikut:

*"Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka penyerahan azas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa diserahkan sepenuhnya kepada daerah, baik yang menyangkut pada penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya. Demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri, terutama dinas-dinas daerah."*¹⁷

Sedangkan menurut Inu Kencana Syafi'i:

*"Azas desentralisasi adalah azas penyerahan sebagai urusan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri. Dengan teknik desentralisasi sebagian urusan pemerintahan diserahkan daerah otonom menjadi urusan rumahtangganya."*¹⁸

Dalam dasar pemikiran UU No. 32 Tahun 2004, ketentuan umum nomor 1 disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu dalam pasal 18 UUD 1945, yang antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya

¹⁷ Ir. Sujamto. "Cakrawala Otonomi Daerah," Sinar Grafika, 1988. hal 30

¹⁸ Inu Kencana Syafi'i, "Ilmu Pemerintahan", Mandar Maju Bandung, 1994, Hal. 227

ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam penjelasan pasal tersebut, antara lain dikemukakan bahwa "Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *cenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga, daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang." Di daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Dengan dianutnya asas desentralisasi yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya dengan seluas-luasnya maka dapat dilihat kebaikan dalam asas ini. Kelebihan dari asas desentralisasi adalah:

- Meringankan beban, karena aparat pemerintah pusat tidak perlu lagi jauh-jauh ke daerah dimana aparat daerah sudah difungsikan dengan baik untuk mengurus sendiri daerahnya dengan pemberian otonomi.
- Masyarakat berpartisipasi pada daerahnya karena setiap individu yang memiliki keahlian di daerahnya akan segera terlihat.
- Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparat pemerintah daerah, karena diberikan kesempatan berkembang dan berkarya.
- Menciptakan administrasi yang relatif fleksibel, inovatif dan kreatif karena dalam rangka kerja sama untuk mencapai tujuan tersebut muncul kreasi, keinginan untuk maju dan berkembang serta luwes dalam menyelesaikan permasalahan daerah.

- Manfaat yang diperoleh besar, karena masyarakat terpenuhi melalui pendemokrasian di daerah, memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan publik yang juga secara implisit berarti adanya penghargaan terhadap hak-hak sipil.¹⁹

Berdasarkan definisi tersebut diatas maka yang dimaksud dengan desentralisasi dalam penelitian ini adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti pengertian desentralisasi yang dianut oleh UU No. 33 Tahun 2004.

4. *Visi Indonesia Sehat 2010*

a. Rencana Strategis

Definisi rencana strategi menurut buku perencanaan strategis bagi organisasi sosial adalah:

*Perencanaan strategis adalah sekumpulan konsep, prosedur dan alat serta sebagian karena sifat khas praktik perencanaan sektor publik di tingkat lokal.*²⁰

Dalam perencanaan strategi terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil antara lain adalah:

- berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif
- memperjelas arah masa depan
- menciptakan prioritas
- membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan

¹⁹ SKH. "Kompas", 20 Desember 2000, hal.6

²⁰ John M. Bryson, *Perencanaan strategis bagi organisasi sosial*, Pustaka Pelajar Yogyakarta 2003. hal 10

- mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan
- menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam bidang-bidang yang berada kontrol organisasi
- membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi
- memecahkan masalah utama organisasi
- menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif
- membangun kerja kelompok dan keahlian

Sedangkan pengertian rencana strategi menurut profil Kabupaten Sleman adalah;

Rencana strategi daerah adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3(tiga) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, mengandung visi, misi, nilai-nilai, faktor-faktor penentu keberhasilan, dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat di capai.²¹

Rencana strategis daerah merupakan pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai tolok ukur dari pencapaian tujuan pembangunan daerah. Maksud dan tujuan rencana strategis daerah adalah:

- sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah.
- Untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih memantapkan pelaksanaan

²¹ Profil Kabupaten Sleman tahun 2005. hal 8

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

b. Visi

Visi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman implementasi pembangunan. Visi yang baik dapat didefinisikan sebagai:

"Visi adalah deskripsi tentang apa yang mau dicapai oleh organisasi setelah organisasi tersebut mengimplementasikan strateginya dan mencapai potensi sepenuhnya."²²

Visi yang terumuskan dengan baik setidaknya harus memiliki dua unsur utama yaitu:

➤ Ideologi inti

Ideologi inti menunjukkan karakter abadi sebuah organisasi dan merupakan identitas yang sangat penting bahkan melebihi model manajemen, siklus hidup barang atau pasar dan terobosan teknologi dalam sebuah perusahaan. Ideologi inti memberikan sumbangan yang paling signifikan secara terus-menerus kepada siapa saja yang akan merumuskan sebuah visi.

Ideologi inti menjadi suatu perekat ketika sebuah organisasi mulai tumbuh menjadi besar, bahkan ketika berekspansi secara global hingga terbentuk lokasi kerja yang saling berjauhan. Visi yang efektif harus memasukkan ideologi inti yang terdiri dari dua unsur yang berbeda, yaitu nilai inti yang dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang mengarah ajaran-ajaran

²² Mudrajad Kuncoro. Ph.D, Otonomi Dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang), Erlangga, Jakarta 2004 hal. 65

beserta prinsip dan tujuan inti yang merupakan alasan paling fundamental mengenai keberadaan sebuah organisasi.

- membayangkan masa depan.

Komponen penting kedua dari kerangka visi adalah menggambarkan (membayangkan masa depan) yang terdiri dari dua bagian, yaitu: tujuan 10 – 30 tahun dan gambaran yang hidup mengenai bagaimana cara mencapai tujuan.

Karakteristik visi yang baik umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- berorientasi kemasa depan, artinya memberikan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang diinginkan oleh daerah.
- Inspiratif, artinya mendorong semua perangkat untuk menuju imaginasi atau impian yang disepakati.
- Realistis, artinya berupaya mencapai gambaran realitas yang paling optimal selama kurun waktu tertentu.

Adapun definisi lain dari visi seperti diuraikan oleh Drs. R.A. Supriyono, S.U., Akt dalam buku manajemen strategi dan kebijaksanaan bisnis Edisi 2 adalah sebagai berikut:

*Visi adalah pandangan atau wawasan luas manajemen mengenai kondisi (lingkup, skala dan ukuran) yang ingin dicapai oleh organisasi di masa depan.*²³

Visi menumbuhkan komitmen para karyawan untuk mewujudkan visi tersebut menjadi kenyataan. Agar dapat menentukan visi dengan jelas bagi suatu organisasi, manajemen harus dapat menjawab pertanyaan mengenai: *What business are we in*

²³ Drs. R.A. Supriyono, S.U., Akt, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis Edisi 2*, BPFE, Yogyakarta, 1998. hal 41

now? (dalam bisnis apa sekarang kita berada?) untuk menjawab pertanyaan tersebut manajemen harus:

- menganalisis lingkup, skala, ukuran dan bauran produk, aktivitas dan pasar organisasi pada saat ini.
- memandang kedepan dengan cara membandingkan celah antara apa yang sesungguhnya dicapai dengan apa yang ingin dicapai.
- celah tersebut digunakan oleh manajemen untuk menentukan arah dan pola organisasi di masa depan.

Meskipun analisis dan pemikiran-pemikiran strategis dapat membantu manajemen dalam memacu kreatif dan intuitif. Visi yang jelas juga dapat membantu para manajer menunjukkan peluang strategis. Peluang strategis adalah peluang-peluang kini yang mengakibatkan tujuan organisasi yang sekarang ada menjadi usang.

c. Misi

Dalam buku konsep Manajemen Strategis karangan Fred R. David, misi dapat diartikan sebagai berikut:

*Suatu misi merupakan dasar untuk menetapkan prioritas, strategi, rencana, dan penugasan kerja.*²⁴

Definisi misi menurut buku Manajemen Stratejik adalah sebagai berikut:

*Misi adalah maksud dan kegiatan utama yang membuat organisasi memiliki jati diri yang khas dan sekaligus membedakannya dengan organisasi lain yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis.*²⁵

²⁴ Fred R. David, *Konsep Manajemen Strategis Edisi Ketujuh*, PT Prehallindo, Jakarta 2002

²⁵ Prof. Dr. Sondang P. Siagian. MPA, *Manajemen Stratejik*, Bumi aksara, Jakarta 2005. hal 43

Misi merupakan suatu bentuk pernyataan umum tetapi bersifat lestari oleh manajemen puncak yang mengandung niat organisasi yang bersangkutan.

Hal-hal yang ingin dicapai melalui rumusan misi dapat diuraikan sebagai berikut:

- dengan rumusan misi yang tepat, dikalangan para anggota organisasi terdapat kesamaan persepsi tentang maksud keberadaan organisasi yang bersangkutan.
- Dengan rumusan misi yang baik, dasar kuat diletakkan untuk motivasi penggunaan sumber daya, sarana, prasarana, tenaga dan waktu yang dimiliki oleh perusahaan secara efisien dan efektif.
- Dengan misi yang baik, sudah harus terdapat “petunjuk” tentang iklim organisasi yang bagaimana akan ditumbuhkan, dikembangkan dan dipelihara dalam organisasi.
- Misi yang dirumuskan dan diproyeksikan secara tepat akan sangat bermanfaat bagi mereka yang mempunyai wawasan yang sama dengan manajemen organisasi sebagai bahan pertimbangan meniti karir.
- Misi bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri karena ia digali dari tujuan yang ingin dicapai dan diikuti oleh berbagai langkah dalam proses manajemen strategis.

Misi yang dirumuskan dengan tepat akan mengidentifikasi secara umum hal-hal yang ingin dicapai dan memungkinkan penerjemahan hal-hal tersebut sedemikian rupa sehingga operasionalisasi berbagai kegiatan dan hasilnya dapat diukur dan dikendalikan berdasarkan berbagai kriteria yang rasional dan objektif.

d. Indonesia Sehat 2010

Sebagaimana telah disebutkan, banyak faktor yang menyebabkan timbulnya berbagai masalah kesehatan dan kurang memuaskannya kinerja Pembangunan Kesehatan. Akar masalah tampaknya terletak pada kenyataan bahwa Pembangunan Kesehatan belum berada dalam arus utama Pembangunan Nasional. Anggaran untuk Pembangunan Kesehatan di Indonesia masih sangat kecil, yaitu hanya sekitar dua persen (2%) dari anggaran tahunan Pembangunan Nasional. Akibatnya banyak program Pembangunan Kesehatan yang penting untuk diselenggarakan terpaksa ditunda atau dilaksanakan secara kurang memadai.

Selama ini dirasakan bahwa sektor-sektor pembangunan yang lain belum cukup mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Bahkan beberapa kebijakan dan kegiatannya justru berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat tersebut. Pada akhirnya hal ini tecermin antara lain dalam kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia. Dalam tahun 2000, diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI), Indonesia berada pada peringkat 102 di antara sekitar 190 negara di dunia (di tahun 2003 bahkan merosot lagi ke peringkat 112). Ini berarti bahwa kemajuan Pembangunan Kesehatan dan pembangunan sektor lain terkait (khususnya pendidikan dan perekonomian) di Indonesia masih jauh dari memuaskan bila dibanding dengan negara-negara lain di dunia²⁶.

Untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi, telah ditetapkan Visi dan Misi baru Pembangunan Kesehatan. Visi dan Misi baru ini tidak hanya untuk kepentingan menghadapi masalah-masalah kekinian, melainkan juga guna menyongsong tantangan-tantangan di masa mendatang. Dalam waktu dekat Indonesia sudah harus terlibat dalam globalisasi. Agar dapat bersaing dengan baik dalam era globalisasi itu, Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu Pembangunan Kesehatan perlu diarahkan secara lebih baik²⁷.

Dengan Visi dan Misi baru, orientasi Pembangunan Kesehatan yang semula sangat menekankan upaya kuratif dan rehabilitatif, secara bertahap diubah menjadi

²⁶Keputusan Menteri Kesehatan No. 1202/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indicator Provinsi Sehat Dan Kabupaten/Kota Sehat. Hal 3

²⁷ Ibid. hal.3

upaya kesehatan terintegrasi menuju kawasan sehat dengan peran-aktif masyarakat. Pendekatan baru ini menekankan pentingnya upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pemahaman baru terhadap konsep atau definisi kesehatan dan meningkatnya kesadaran akan faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat menimbulkan keyakinan bahwa pelayanan kesehatan kuratif saja tidak mungkin dapat menciptakan Indonesia Sehat 2010.

Landasan idiil pembangunan nasional adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitutionil adalah Undang Undang Dasar 1945. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam Undang undang No. 23 tahun 1992, tentang Kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari bada, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup proaktif secara sosial dan ekonomi. Sedangkan dalam konstitusi Organisasi Kesehatan dunia (WHO) tahun 1848 disepakati antara lain bahwa diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi tingginya adalah suatu hak yang fundamental bagi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, politik yang dianut dan tingkat sosial ekonominya.

Dasar dasar pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah nilai kebenaran atau aturan pokok sebagai landasan untuk berfikir atau bertindak dalam pembangunan kesehatan. Dasar dasar ini merupakan landasan dalam penyusunan visi, misi dan strategi serta sebagai petunjuk pokok pelaksanaan pembangunan kesehatan secara nasional yang meliputi :

- a) Dasar Perikemanusiaan.

Setiap upaya kesehatan harus berlandaskan perikemanusiaan yang dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tenaga kesehatan perlu berbudi luhur dan memegang teguh etika profesi.

b) Dasar Adil dan Merata

Dalam pembangunan kesehatan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, tanpa memandang suku, golongan, agama dan status sosial ekonominya.

c) Dasar Pemberdayaan dan Kemandirian.

Setiap orang dan masyarakat bersama dengan pemerintah berperan, berkuajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga dan lingkungannya. Setiap upaya kesehatan harus mampu membangkitkan dan mendorong peran serta masyarakat. Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kepercayaan atas kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa.

d) Dasar Pengutamaan dan Manfaat.

Penyelenggaraan upaya kesehatan bermutu yang mengikuti perkembangan IPTEK, lebih mengutamakan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, serta dilaksanakan secara profesional, mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi daerah, berhasil guna. Upaya kesehatan diarahkan agar memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta dilaksanakan dengan penuh

tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

E. DIFINISI KONSEPSIONAL

Yang dimaksud dengan definisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan pembatasan pengertian antara satu konsep dengan konsep yang lain agar tidak terjadi kesalah pahaman. Definisi konsepsional yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dinas kesehatan adalah unsur pelaksana pemerintah Kabupaten/Kota yang bergerak dibidang kesehatan dan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.
4. Rencana Strategis, yaitu suatu rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, yang mengandung visi, misi, nilai-nilai, faktor-faktor penentu keberhasilan, dan tujuan pembangunan yang

realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

5. Indonesia Sehat, yaitu keadaan dimana Negara Indonesia memiliki rakyat yang sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Peran Dinas Kesehatan dalam Mewujudkan visi Indonesia Sehat 2010, yaitu serangkaian kegiatan atau keterlibatan dinas kesehatan untuk ikut mewujudkan visi Indonesia sehat 2010.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan indikator-indikator yang dibutuhkan penulis dalam penelitian yang digunakan untuk lebih mendiskripsikan tentang apa yang akan diteliti.

Menurut Saifudin Anwar definisi operasional adalah:

“definisi operasional yang dimaksud adalah batasan atau definisi suatu variabel agar tidak terjadi ambiguous yakni memiliki makna ganda atau tidak menunjukkan indikator yang jelas.”²⁸

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Dalam Mewujudkan Visi Indonesia Sehat 2010.

Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dapat diukur dari:

- Status/data Kesehatan Kabupaten sleman

²⁸ Saifudin Azwar, “Metode Penelitian” Pustaka Pelajar, 2001, hal.59

- Cakupan program kesehatan yang dibuat dalam peranannya mewujudkan Visi Indonesia Sehat 2010.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi Upaya Dinas Kesehatan kabupaten Sleman dalam mewujudkan Visi Indonesia Sehat 2010

G. METODE PENELITIAN

Penelitian ini diusahakan dapat memberikan jawaban tentang peran Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Dalam Mewujudkan visi Indonesia Sehat 2010, guna menjawab pertanyaan tersebut maka dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Didalam jenis penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif

Menurut Winarno Surachmad:

“Penelitian deskriptif merupakan istilah yang umum dan mencakup beberapa teknik deskriptif, diantaranya penelitian yang menuturkan, mengklasifikasikan dan menganalisa data serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada saat sekarang dengan menggunakan teknik interview, observasi dan dokumentasi.”²⁹

Berdasarkan penelitian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu yang berlaku saat ini. Dengan kata lain penulisan deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.

²⁹ Winarno Surachmad, dasar dan teknik research pengantar metodologi ilmiah, tarsito Bandung, 1990, Hal.139.

Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau penelitian hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

2. *Sumber Data*

a. *Data Primer*

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan jalan penulis mengadakan wawancara langsung atau kunjungan ke instansi terkait dengan penelitian mengenai Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Dalam Mewujudkan visi Indonesia Sehat 2010.

b. *Data Sekunder*

Yaitu, data yang dikumpulkan dengan mencatat dari buku-buku, artikel peraturan-peraturan, serta mencatat dari instansi langsung yang berkaitan dengan penelitian, surat dokumen-dokumen laporan tahunan tentang usaha peningkatan kesehatan guna mewujudkan visi Indonesia Sehat 2010.

3. *Unit Analisa Data*

Dalam penelitian ini unit analisa data dapat diartikan sebagai obyek nyata yang akan diteliti yaitu untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Dalam Mewujudkan visi Indonesia Sehat 2010 maka dalam penelitian ini perlu penyusun tentukan sebagai unit analisisnya adalah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman beserta staf dan jajarannya.

4. *Teknik Pengumpulan Data*

a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah salah satu metode untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak terkait yang mempunyai wewenang dengan penelitian ini, yaitu dinas kesehatan Kabupaten Sleman bagian Yanmedis.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku, dokumentasi, catatan-catatan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman atau instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian dan juga buku-buku literatur yang digunakan sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperoleh data. Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan dan mengajarkan teori-teori, bahan-bahan serta peraturan-peraturan dan informasi lain yang diperoleh dari buku-buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. *Teknik Analisa Data*

Teknik analisa data yang dipergunakan adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh dikualifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, selanjutnya menganalisa dengan gejala atau obyek yang diteliti dan menginterpretasikan data atas dasar teori yang ada serta runtut memakai makna yang bersifat menyeluruh.

Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut diperoleh dengan cara membaca catatan laporan, dokumen resmi dan sebagainya, untuk memperoleh keabsahan data penelitian ini dengan memperhatikan validitas, reabilitas dan obyektifitas.